CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 7 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PROGRAM MAGANG DI PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA: PENINGKATAN KOMPETENSI MAHASISWA HUKUM TATA NEGARA MELALUI PRAKTIK KEMAHIRAN HUKUM

Novia Safitri, Naqibah Tamimah, Yunda Rahayu Nisrina

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya
Email: noviasafitri916@gmail.com | naqibaht@gmail.com | yundarahayuu@gmail.com

Abstrak

Program magang merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui pengalaman praktik secara langsung di dunia kerja. Kegiatan magang ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palangka Raya selama dua minggu dan melibatkan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Palangka Raya. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai administrasi peradilan, mekanisme persidangan, serta pelayanan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan. Metode yang digunakan meliputi observasi, partisipasi langsung, dokumentasi, dan pendampingan administrasi perkara. Mahasiswa terlibat dalam berbagai kegiatan pada Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam pengelolaan administrasi perkara, penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pelayanan berbasis e-Court, pengarsipan dokumen hukum, serta observasi proses persidangan. Selain meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hukum, program magang juga membentuk sikap profesional, kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan komunikasi, dan etika kerja mahasiswa. Dengan demikian, program magang di Pengadilan Negeri Palangka Raya memberikan kontribusi positif dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja dan profesi hukum.

Kata Kunci: Magang, Kompetensi Hukum, Administrasi Peradilan, Pengadilan Negeri, Mahasiswa Hukum.

Abstract

The internship program is a form of learning that aims to improve student competency through direct practical experience in the workplace. This internship was conducted at the Palangka Raya District Court for two weeks, involving students of the Constitutional Law Study Program at the Islamic State University of Palangka Raya. The purpose of this activity was to improve students' understanding of judicial administration, trial mechanisms, and legal services provided by the judiciary. The methods used included observation, direct participation, documentation, and case administration assistance. Students were involved in various activities in the Criminal Clerkship, Civil Clerkship, Legal Clerkship, and the Corruption Crime Court (TIPIKOR). The results showed that students gained practical experience in case administration management, the use of the Case Tracking Information System (SIPP), e-Court-based services, legal document archiving, and observation of trial proceedings. In addition to improving legal knowledge and skills, the

Article History
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

internship program also developed students' professional attitudes, discipline, responsibility, communication skills, and work ethics. Thus, the internship program at the Palangka Raya District Court made a positive contribution in preparing students for the world of work and the legal profession.

***Keywords**: Internship, Legal Competence, Judicial Administration, District Court, Law Student.*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan dunia kerja. Dalam bidang hukum, proses pembelajaran tidak hanya menekankan penguasaan teori, tetapi juga kemampuan untuk memahami dan menerapkan hukum dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pembelajaran yang mampu menghubungkan pengetahuan akademik dengan kondisi nyata di lapangan. Salah satu bentuk pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan tersebut adalah program magang.

Program magang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman langsung dalam lingkungan kerja yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan profesional, meningkatkan kemampuan komunikasi, memahami etika kerja, serta memperluas wawasan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi suatu lembaga.

Bagi mahasiswa Hukum Tata Negara, pengalaman praktik pada lembaga peradilan memiliki nilai yang sangat penting. Pengadilan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tidak hanya berfungsi menyelesaikan perkara, tetapi juga melaksanakan berbagai aktivitas administrasi yang mendukung terciptanya pelayanan hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel. Pemahaman mengenai proses administrasi peradilan menjadi bagian penting dalam membentuk kompetensi mahasiswa sebagai calon praktisi maupun akademisi hukum.

Pengadilan Negeri Palangka Raya merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perdata. Selain menjalankan fungsi peradilan, lembaga ini juga terus mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi melalui pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan aplikasi e-Court. Kehadiran sistem tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan serta mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Melalui program magang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palangka Raya, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan administrasi dan pelayanan hukum. Kegiatan tersebut meliputi pengelolaan administrasi perkara pidana dan perdata, pengarsipan dokumen hukum, pengelolaan data perkara melalui SIPP, pelayanan e-Court, serta observasi proses persidangan. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program magang di Pengadilan Negeri Palangka Raya serta menganalisis kontribusinya dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa Hukum Tata Negara melalui pengalaman belajar yang diperoleh secara langsung di lingkungan peradilan.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan magang ini adalah metode partisipatif melalui observasi, partisipasi langsung, dokumentasi, dan refleksi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap orientasi, tahap pelaksanaan kegiatan, dan tahap evaluasi dan penyusunan laporan.

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tempat : Pengadilan Negeri Palangka Raya, Jl. Diponegoro No. 21, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Waktu Pelaksanaan : 5 Februari 2026 s.d. 20 Februari 2026

Metode Pelaksanaan

1. Observasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur organisasi, sistem administrasi peradilan, serta mekanisme pelayanan hukum yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palangka Raya.

2. Partisipasi Langsung. Partisipasi langsung dilakukan dengan membantu berbagai kegiatan administrasi pada Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

3. Dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan selama kegiatan magang, baik berupa data administrasi, arsip kegiatan, maupun laporan harian.

4. Refleksi. Refleksi dilakukan sebagai proses evaluasi terhadap pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan magang guna mengidentifikasi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mahasiswa mengenai praktik administrasi peradilan.

Tahapan Pelaksanaan

Tahap pertama adalah tahap orientasi yang meliputi pengenalan lingkungan kerja, struktur organisasi, tugas dan fungsi masing-masing bagian, serta tata tertib yang berlaku di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan kegiatan, yaitu keterlibatan mahasiswa dalam berbagai aktivitas administrasi dan pelayanan hukum pada setiap bagian kepaniteraan. Tahap ketiga adalah tahap evaluasi dan penyusunan laporan yang dilakukan melalui refleksi terhadap pengalaman selama kegiatan berlangsung serta penyusunan artikel sebagai luaran kegiatan magang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program magang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palangka Raya merupakan bagian dari Praktik Kemahiran Hukum (PKH) I yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa Hukum Tata Negara melalui pengalaman belajar secara langsung di lingkungan peradilan. Selama dua minggu pelaksanaan kegiatan, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memahami sistem administrasi peradilan, mekanisme pelayanan hukum, serta proses pengelolaan perkara yang berlangsung di Pengadilan Negeri Palangka Raya.

1. Kepaniteraan Pidana

Pada Kepaniteraan Pidana, mahasiswa terlibat dalam berbagai kegiatan administrasi perkara pidana dan perkara pelanggaran lalu lintas (tilang). Kegiatan yang dilakukan meliputi pencatatan register perkara, penyusunan surat keterangan tilang, pengelolaan berkas perkara, serta penginputan data melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui keterlibatan dalam pengelolaan administrasi perkara, mahasiswa memahami bahwa ketelitian dan ketepatan dalam pencatatan data merupakan aspek yang sangat penting dalam pelayanan peradilan. Oleh karena itu, administrasi perkara tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Kepaniteraan Perdata

Pada bagian Kepaniteraan Perdata, mahasiswa membantu proses administrasi perkara yang diajukan melalui aplikasi e-Court. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen, pencatatan administrasi perkara, pengarsipan berkas, serta pendataan perkara yang sedang berjalan. Melalui keterlibatan secara langsung dalam pengelolaan administrasi berbasis elektronik, mahasiswa memperoleh pengalaman mengenai penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan

hukum. Selain itu, mahasiswa juga memahami bahwa kemampuan mengoperasikan sistem digital menjadi kompetensi yang penting bagi calon praktisi hukum di era modern.

3. Kepaniteraan Hukum

Pada Kepaniteraan Hukum, mahasiswa membantu kegiatan pengarsipan putusan, pencatatan surat keputusan, pengelolaan surat kuasa, serta penyusunan dokumen hukum lainnya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memahami bahwa dokumen hukum merupakan sumber informasi yang memiliki nilai penting dalam proses peradilan. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman bahwa administrasi hukum merupakan salah satu unsur pendukung terciptanya pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Mahasiswa juga memperoleh kesempatan untuk melakukan observasi dan membantu kegiatan administrasi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Kegiatan yang dilakukan meliputi pengelolaan berkas perkara, penataan arsip, serta pengamatan terhadap proses administrasi yang mendukung pelaksanaan persidangan tindak pidana korupsi. Selain memahami aspek administratif, mahasiswa juga memperoleh gambaran mengenai pentingnya profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dalam penanganan perkara korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan yang berdampak luas terhadap masyarakat.

5. Penggunaan SIPP dan e-Court

Salah satu pengalaman penting yang diperoleh selama kegiatan magang adalah keterlibatan dalam penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan aplikasi e-Court. Melalui penggunaan SIPP, mahasiswa dapat memahami proses pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan perkembangan perkara secara elektronik. Sementara itu, penggunaan e-Court memberikan pemahaman mengenai mekanisme pelayanan perkara berbasis digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan hukum secara lebih mudah dan efisien. Pengalaman ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam lembaga peradilan tidak hanya meningkatkan efektivitas kerja pegawai, tetapi juga mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

6. Dampak terhadap Kompetensi Mahasiswa

Program magang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa baik dari aspek pengetahuan maupun keterampilan. Dari aspek pengetahuan, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai administrasi peradilan, sistem informasi pengadilan, prosedur pelayanan hukum, serta mekanisme pengelolaan

perkara. Dari aspek keterampilan, mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan komunikasi, kerja sama, kedisiplinan, tanggung jawab, dan etika profesi. Interaksi langsung dengan hakim, panitera, dan pegawai pengadilan memberikan pengalaman praktis yang tidak diperoleh melalui pembelajaran di kelas. Dengan demikian, program magang menjadi sarana yang efektif dalam mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja dan profesi hukum di masa mendatang.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Praktik Kemahiran Hukum (PKH) I di Pengadilan Negeri Palangka Raya memberikan pengalaman praktis yang bermanfaat bagi mahasiswa Hukum Tata Negara dalam memahami administrasi peradilan dan pelayanan hukum secara langsung. Keterlibatan mahasiswa pada Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) telah meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan perkara, administrasi peradilan, serta pemanfaatan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan e-Court. Selain meningkatkan kompetensi, kegiatan magang juga berkontribusi dalam pengembangan keterampilan komunikasi, kedisiplinan, tanggung jawab, dan etika profesi. Dengan demikian, program magang menjadi sarana yang efektif dalam menjembatani teori yang diperoleh di perguruan tinggi dengan praktik hukum di lingkungan peradilan serta kesiapan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja dan profesi hukum di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palangka Raya, khususnya Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan Program Praktik Kemahiran Hukum (PKH) I. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya beserta seluruh hakim, panitera, pegawai, dan staf yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta pengalaman berharga selama kegiatan magang berlangsung. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan pendampingan dalam penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Kautsar, Muhammad. 2023. "Eksistensi Mahasiswa Magang dalam Optimalisasi Layanan Administrasi di Instansi Pemerintah." Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa 1(4): 210–214.

Arifin, Ridwan. 2024. "Bridging the Gap Between Normative Legal Theory and Judicial Practices Through Clinical Legal Education." Indonesian Journal of Legal Clinical Studies 7(2): 134–138.

Busyairi, Wildan. 2023. "Digitalisasi Arsip dan Pemanfaatan SIPP dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri." Jurnal Administrasi Peradilan 5(1): 18–22.

Elmi, Nurul. 2021. "Pemberdayaan Mahasiswa Hukum Melalui Program Magang Kedinasan di Lembaga Peradilan." Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia 4(2): 112–115.

Fatih, Sholahuddin Al-. 2018. "Model Pembelajaran Clinical Legal Education Bagi Mahasiswa Hukum." Jurnal Hukum Novelty 9(1): 112–120.

Fikri, Ahmad. 2022. "Analisis Beban Kerja dan Efisiensi Pelayanan Teknis Administrasi Perkara Pidana." Jurnal Hukum Acara dan Peradilan 12(2): 89–97.

Marwiyah, Siti. 2021. "Metode Moot Court (Peradilan Semu) dalam Meningkatkan Kemahiran Hukum Acara Mahasiswa." Jurnal Pembelajaran Hukum Nasional 6(1): 55–60.

Pujianto, Aris. 2020. "Implementasi Aplikasi E-Court dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan." Jurnal Hukum dan Peradilan 9(3): 340–345.

Setyowati, Herlina. 2022. "Kolaborasi Akademisi dan Praktisi dalam Mendorong Reformasi Administrasi Peradilan Modern." Jurnal Hukum Acara 8(2): 145–152.

Suprianto, Agus. 2021. "Pentingnya Magang Kerja (Internship) dalam Meningkatkan Kesiapan Kerja Mahasiswa Hukum." Jurnal Ilmiah Edunomika 5(2): 780–785.